

**2015 - 2019**

**REVIU  
RENCANA  
STRATEGIS  
(RENSTRA)**

PENGADILAN NEGERI SAROLANGUN



**PENGADILAN NEGERI SAROLANGUN**

Komplek Perkantoran Gunung Kembang Kabupaten Sarolangun

Telp./Fax : 0745 - 91006

Website : [www.pn-sarolangun.go.id](http://www.pn-sarolangun.go.id)



**PENGADILAN NEGERI SAROLANGUN**

**SURAT KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI SAROLANGUN**

Nomor: W5-U9/1735b/Kp.00.3/11/2019

**TENTANG**

**TIM REVIU RENCANA STRATEGIS TAHUN 2015 – 2019  
PENGADILAN NEGERI SAROLANGUN**

**KETUA PENGADILAN NEGERI SAROLANGUN,**

- Menimbang** : 1. Bahwa untuk memenuhi surat dari Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor 1604/SEK/OT.01.2/11/2019 tanggal 15 November 2019 hal Penyampaian Dokumen SAKIP;
2. bahwa dalam rangka terjadi perubahan Indikator Kinerja Utama maka dipandang perlu dibentuk tim untuk melakukan reviu terhadap Rencana Strategis Pengadilan Negeri Sarolangun;
3. bahwa mereka yang namanya tercantum dalam Keputusan ini dipandang cakap dan mampu untuk melaksanakan tugas dalam tim kerja tersebut.
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung;
2. Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
3. Undang-undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang- undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum;
4. Peraturan Presiden RI Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
5. Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan di Pengadilan;
6. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: PER/9M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja;

7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi Atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI SAROLANGUN TENTANG TIM REVIU RENCANA STRATEGIS TAHUN 2015 – 2019 PENGADILAN NEGERI SAROLANGUN.
- PERTAMA : Membentuk Tim Reviu Rencana Strategis Tahun 2015 – 2019 Pengadilan Negeri Sarolangun yang susunan keanggotaannya seperti termuat dalam lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Tugas pokok Tim Reviu Rencana Strategis Tahun 2015 – 2019 Pengadilan Negeri Sarolangun adalah meninjau kembali atau melakukan penyempurnaan terhadap Indikator Kinerja Utama yang telah ada.
- KETIGA : Melaksanakan Keputusan ini dengan penuh tanggung jawab dan melaporkan hasilnya kepada Ketua Pengadilan Negeri Sarolangun.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan bahwa apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Sarolangun  
Pada tanggal 26 November 2019

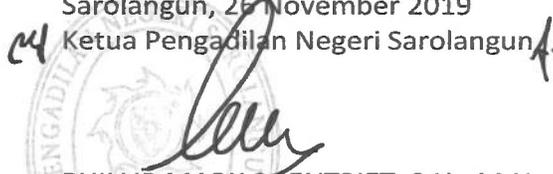
 Ketua Pengadilan Negeri Sarolangun

PHILLIP MARK SOENTPIET, S.H., M.H.  
NIP. 197411142000121002

Lampiran: Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Sarolangun  
Nomor : W5-U9/1735b/Kp.00.3/11/2019  
Tanggal : 26 November 2019

No.	NAMA / NIP	JABATAN	JABATAN DALAM TIM
1.	Phillip Mark Soentpiet, S.H., M.H. NIP. 197411142000121002	Ketua	Penanggung Jawab
2.	Nunung Kristiyani, S.H., M.H. NIP. 197702082001122004	Wakil Ketua	Ketua Pelaksana Kegiatan
3.	M. Soleh, S.H. NIP. 197302041993031004	Panitera	Koordinator I
4.	Juliadi, S.Kom. NIP. 198507012009041003	Sekretaris	Koordinator II
5.	Andi Maddumase, S.H. NIP. 196806221993031006	Panitera Muda Perdata	Anggota
6.	Dedet Syahgitra, S.H. NIP. 198312062009121004	Panitera Muda Hukum	Anggota
7.	Antonius Ringgo Yunanto, S.H. NIP. 198306152005021002	Panitera Muda Pidana	Anggota
8.	Teguh Hariadi, S.Kom NIP. 198108252006041004	Kasubbag Kepegawaian dan Ortala	Anggota
9.	Binnaria Dabukke, S.H. NIP. 197505202006042002	Kasubbag Umum dan Keuangan	Anggota
10.	Fitrisia, S.T. NIP. 198508302011012010	Kasubbag Perencanaan, TI dan Pelaporan	Anggota

Sarolangun, 26 November 2019  
Ketua Pengadilan Negeri Sarolangun



PHILLIP MARK SOENTPIET, S.H., M.H.  
NIP. 197411142000121002





**PENGADILAN NEGERI SAROLANGUN**

**SURAT KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI SAROLANGUN**

Nomor: W5-U9/100/Kp.00.3/1/2020

**TENTANG**

**PENETAPAN REVIU RENCANA STRATEGIS TAHUN 2015 – 2019  
PENGADILAN NEGERI SAROLANGUN**

**KETUA PENGADILAN NEGERI SAROLANGUN,**

- Menimbang** : 1. Bahwa untuk memenuhi surat dari Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor 1604/SEK/OT.01.2/11/2019 tanggal 15 November 2019 hal Penyampaian Dokumen SAKIP;
2. bahwa dalam rangka terjadi perubahan Indikator Kinerja Utama maka dipandang perlu dilakukan reviu terhadap Rencana Strategis Pengadilan Negeri Sarolangun.
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung;
2. Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
3. Undang-undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang- undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
5. Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan di Pengadilan;
6. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: PER/9M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja.

Memperhatikan : Hasil Rapat Tim Reviu Rencana Strategis Tahun 2015 – 2019 Pengadilan Negeri Sarolangun tanggal 17 Desember 2019 tentang Pembahasan Reviu Rencana Strategis Tahun 2015 – 2019 Pengadilan Negeri Sarolangun.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI SAROLANGUN TENTANG PENETAPAN REVIU RENCANA STRATEGIS TAHUN 2015 – 2019 PENGADILAN NEGERI SAROLANGUN.

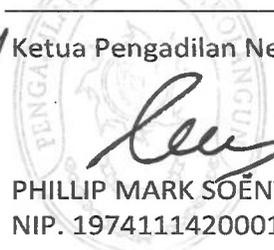
PERTAMA : Reviu Rencana Strategis sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini merupakan acuan kinerja yang digunakan oleh Pengadilan Negeri Sarolangun untuk menetapkan Rencana Kinerja Tahunan, Perjanjian Kinerja dan penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja.

KEDUA : Reviu Rencana Strategis bertujuan untuk lebih menyelaraskan tujuan dan sasaran strategis dengan Indikator Kinerja Utama sehingga dapat dipergunakan untuk mengukur kinerja dan pengendalian pelaksanaan program dan kegiatan.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Sarolangun  
Pada tanggal 6 Januari 2020

 Ketua Pengadilan Negeri Sarolangun

  
PHILLIP MARK SOËNTPIET, S.H., M.H.  
NIP. 197411142000121002

## MATRIKS REVIU RENCANA STRATEGIS TAHUN 2015 – 2019

- Instansi : Pengadilan Negeri Sarolangun  
 Visi : Terwujudnya Pengadilan Negeri Sarolangun yang Agung  
 Misi :
  1. Menjaga Kemandirian Pengadilan Negeri Sarolangun
  2. Memberikan Pelayanan Hukum yang Berkeadilan kepada Pencari Keadilan
  3. Meningkatkan Kualitas Kepemimpinan di Pengadilan Negeri Sarolangun
  4. Meningkatkan Kredibilitas dan Transparansi di Pengadilan Negeri Sarolangun

No.	Tujuan		Target Jangka Menengah (5 Tahun)	Sasaran Strategis		Target (%)				
	Uraian	Indikator Kinerja	%	Uraian	Indikator Kinerja	2015	2016	2017	2018	2019
1.	Terwujudnya kepercayaan masyarakat terhadap sistem peradilan melalui proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel	Persentase sisa perkara perdata yang diselesaikan	100	Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan, dan Akuntabel	Persentase Sisa Perkara Perdata yang Diselesaikan	100	100	100	100	100
		Persentase sisa perkara pidana yang diselesaikan	100		Persentase Sisa Perkara Pidana yang Diselesaikan	100	100	100	100	100
		Persentase perkara perdata yang diselesaikan tepat waktu	90		Persentase Perkara Perdata yang Diselesaikan Tepat Waktu	83	83	85	85	90
		Persentase perkara pidana yang diselesaikan tepat waktu	98		Persentase perkara pidana yang diselesaikan tepat waktu	92	92	95	95	98
		Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Banding	90		Persentase Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding	80	80	85	85	90

No.	Tujuan		Target Jangka Menengah (5 Tahun)	Sasaran Strategis		Target (%)				
	Uraian	Indikator Kinerja	%	Uraian	Indikator Kinerja	2015	2016	2017	2018	2019
		Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Kasasi	95		Persentase Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi	85	85	90	90	95
		Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Peninjauan Kembali	98		Persentase perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Peninjauan Kembali	92	92	95	95	98
		Persentase perkara Pidana Anak yang diselesaikan dengan Diversi	10		Persentase Perkara Pidana Anak yang Diselesaikan dengan Diversi	5	5	10	10	10
		Index Kepuasan Pencari Keadilan terhadap penyelenggaraan pelayanan peradilan	80		Index Kepuasan Pencari Keadilan	70	70	75	75	80
2.	Terwujudnya peningkatan efektivitas dalam pengelolaan penyelesaian perkara	Persentase salinan putusan perkara perdata yang dikirim kepada para pihak tepat waktu	100	Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	Persentase Salinan Putusan Perkara Perdata yang dikirim kepada Para Pihak tepat waktu	100	100	100	100	100
		Persentase salinan putusan perkara pidana yang dikirim kepada para pihak tepat waktu	100		Persentase Salinan Putusan Perkara Pidana yang dikirim kepada Para Pihak Tepat Waktu	100	100	100	100	100
		Persentase perkara yang diselesaikan melalui mediasi	12		Persentase Perkara yang Diselesaikan Melalui Mediasi	8	8	10	10	12

No.	Tujuan		Target Jangka Menengah (5 Tahun)	Sasaran Strategis		Target (%)				
	Uraian	Indikator Kinerja	%	Uraian	Indikator Kinerja	2015	2016	2017	2018	2019
		Persentase berkas perkara yang dimohonkan Banding, Kasasi, dan PK yang diajukan secara lengkap dan tepat waktu	100		Persentase Berkas Perkara yang Dimohonkan Banding, Kasasi, dan PK yang Diajukan Secara Lengkap dan Tepat Waktu	100	100	100	100	100
		Persentase putusan perkara yang menarik perhatian masyarakat yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari setelah putus	100		Persentase Putusan Perkara yang Menarik Perhatian Masyarakat yang Dapat Diakses Secara Online dalam Waktu 1 Hari Setelah Putus	100	100	100	100	100
3.	Terwujudnya peningkatan akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan	Persentase perkara yang diselesaikan melalui pembebasan biaya/prodeo	100	Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan	Persentase Perkara Prodeo yang Diselesaikan	100	100	100	100	100
		Persentase perkara yang diselesaikan melalui sidang keliling/ zitting plaats	-		Persentase Perkara yang Diselesaikan di Luar Gedung Pengadilan	-	-	-	-	-
		Persentase pencari keadilan golongan tertentu yang terlayani melalui Posbakum	100		Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)	100	100	100	100	100

No.	Tujuan		Target Jangka Menengah (5 Tahun)	Sasaran Strategis		Target (%)				
	Uraian	Indikator Kinerja	%	Uraian	Indikator Kinerja	2015	2016	2017	2018	2019
4.	Terwujudnya peningkatan kepatuhan terhadap putusan pengadilan	Persentase putusan perkara perdata yang berkekuatan hukum tetap yang dilaksanakan secara sukarela	100	Meningkatnya Kepatuhan terhadap Putusan Pengadilan	Persentase Putusan Perkara Perdata yang Ditindak lanjuti (Dieksekusi)	100	100	100	100	100